

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara yang sangat amat kaya dengan beragam sumber daya alam yang ada didalamnya, Penggunaan hasil sumber daya alam diambil untuk menopang pokok-pokok kemakmuran rakyat, tetapi harus dengan memperhatikan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan dengan terencana supaya hasil yang didapat tidak merugikan, rasional serta optimal dan tak lupa bertanggung jawab. faktor lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang menentukan pembangunan, tetapi saat ini Indonesia selalu saja mengalami problematika akibat dampak yang ditimbulkan pembangunan, karena tidak sesuai dengan manfaat dan teori pembangunan berkelanjutan yang seharusnya diterapkan.

Terutama permasalahan terhadap PLTU yang memakai bahan bakar utama yaitu batu bara, tentu saja hal ini sering menjadi konflik terhadap perusahaan dan masyarakat karena terkadang dampak yang ditimbulkan selalu saja membuat resah dan merugikan masyarakat sekitar PLTU, kemudian tak jarang pihak minoritas semena-mena terhadap pihak mayoritas, contohnya mengambil lahan warga secara paksa kemudian mengganti rugi yang tidak seimbang atau malah tidak mengganti sedikitpun, kemudian untuk warga yang memberontak dengan adanya pembangunan ataupun pengoperasiannya dianggap menghalangi jalannya kerja.

Kegiatan pembangunan PLTU Teluk Sepang yang menggunakan bahan bakar batu bara ini menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Pasalnya dampaknya sudah dirasakan masyarakat sekitar PLTU, mulai dari penemuan

lingkungan oleh proses pengelolaan, baik fly ash dan bottom ash yang mengandung abu beracun, pencemaran ekosistem dan biota laut, serta menghancurkan mata pencaharian warga sekitar. Ketua Kanopi Hijau Bengkulu, Ali Akbar menyatakan bahwasanya:

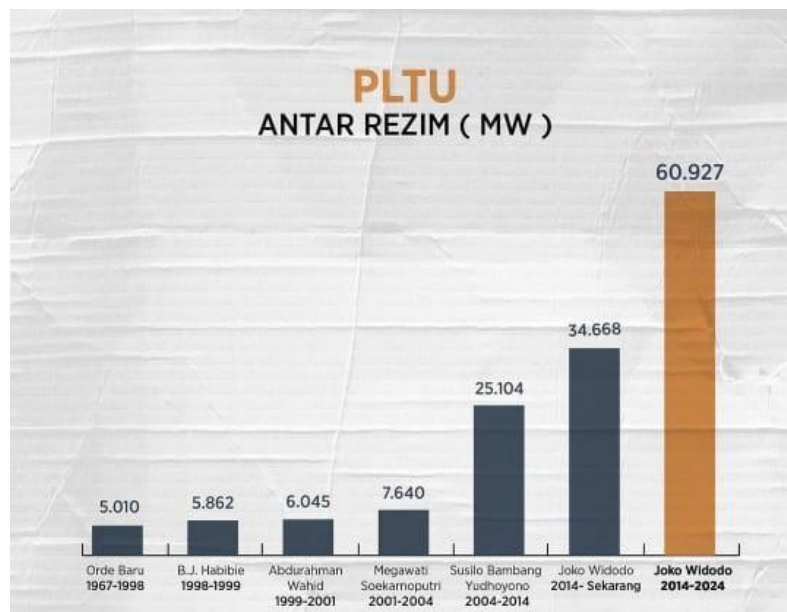
“Dalam lima tahun terakhir, 13 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam STuEB telah mendokumentasikan dampak negatif pembangkit listrik tenaga batubara di Sumatera, antara lain rusaknya mata pencaharian nelayan dan petani, paparan abu beracun bagi anak-anak, konflik horizontal, dan pencemaran lingkungan yang mengerikan” (Data Sekunder dari Berita Kompas Tv, 23 September (2021).

Jika dilihat dari teori pembangunan berkelanjutan, Indonesia masih bisa dikatakan sangat jauh/ belum mencerminkan realitas sebenarnya dan belum ditemukannya bukti-bukti bahwasanya pertumbuhan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan oleh masyarakat sendiri dengan menjamin pemerataan telah terjadi, serta faktanya hanya berdampak terhadap peningkatan kekayaan pada segelintir orang-orang tertentu saja atau bisa dikatakan pihak-pihak minoritas dan tentunya mengakibatkan terjadinya kesenjangan, Maka dari itu jika dilihat dari hasil yang didapat terhadap pembangunan berkelanjutan, harus adanya perubahan terhadap orientasi pembangunan tentunya terhadap semua aspek dan juga sektor lingkungan masyarakat yang menonjol terhadap kesenjangan/ketimpangan.

Indonesia juga merupakan pengekspor/produsen bahan bakar batu bara nomor 4 di dunia. Oleh sebab itu, yang tentu akhirnya menyebabkan emisi karbon terbesar didunia, Indonesia juga mengekspor bahan bakar batu bara ke china, padahal Indonesia memiliki masa depan untuk pembaharuan (Klausa Hubacek, National seminar 2021). Sedangkan menurut saya sendiri terkait kontribusi pengurangan emisi karbon di indonesia sendiri belum memadai dan masih bersifat pengungkapan sukarela sehingga belum dilakukan/dilaksanakan tanggung jawab secara penuh oleh emiten (perusahaan yang bersangkutan baik swasta maupun non) tentang sangat pentingnya upaya yang harus dilakukan dalam mengurangi dan menurunkan emisi karbon.

Pemerintah Indonesia dalam konferensi tentang penurunan emisi malah mengambil langkah dan sangat pro terhadap mekanisme pasar skema offset atau bisa disebut (perdagangan karbon) bahkan bisa dikatakan pemerintah Indonesia sangat mendukung penuh yang dimana diinginkan oleh negara-negara industri bersangkutan. Negara-negara industri juga dilihat bahkan enggan/memperlihatkan keenggannya dalam kewajiban yang seharusnya dilakukan yaitu untuk mengurangi/melakukan penurunan emisi karbon seperti yang seharusnya. Disamping itu padahal untuk mencegah hal yang tidak diinginkan yaitu tentu saja perubahan iklim, terutama terhadap negara-negara berkembang dan miskin, karena penurunan emisi karbon sangat penting dilakukan dan negara-negara industri maju merupakan suatu keharusan. Jika dilihat sangat jelas pengaruh korporasi yang sangat kuat didalam penentuan/pengambilan berbagai kebijakan negara, padahal seharusnya ialah negara seharusnya sangat bertanggung jawab penuh terhadap melindungi warga negara dan juga lingkungan hidupnya.

Gambar 1.1 Antar Rezim



Sumber : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Statistik ketenagalistrikan, Capaian kinerja 2020 dan program 2021

PLTU Teluk Sepang merupakan pengembangan baru di bidang PLTU yang berdiri sejak tahun 2016 di Bengkulu. Tepatnya di Kecamatan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Pulau Baai, Kota Bengkulu. Dan mulai beroperasi pada tahun 2020. Dimiliki oleh PT. Pelindo II dan berdiri di atas lahan seluas 50 hektar, dengan pinjaman US\$360 juta dari EBC (Exim Bank China) dan pinjaman US\$270 juta dari ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). Sinohydro, sebuah bisnis Cina, bertanggung jawab atas pembangunannya. PLTU Teluk Sepang memakai/menggunakan sekitar 2.732,4 Ton bahan bakar batu bara perharinya, kemudian tentunya limbah air bahang panas yang dihasilkan ribuan kubik serta langsung dialirkan oleh perusahaan tepat dijilatan ombak sehingga semua ekosistem laut terganggu, dan juga terjadi pencemaran lingkungan akibatnya karena masuknya/dimasukkannya zat energi/komponen kedalam lingkungan dan bisa dikatakan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun sampai ketinggian tertentu yang tentu saja membuat fungsi lingkungan menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana sesuai dengan peruntukannya.

Pembangunan suatu negara merupakan pembangunan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan/dampak yang akan terjadi setelah pembangunan dilakukan, diantaranya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk menjamin mutu hidup masyarakat tentunya. Selanjutnya mutu hidup adalah sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar yang seharusnya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 pilar yang sangat penting yaitu, sosial, ekonomi serta tentunya lingkungan yang harus dijalankan dengan baik supaya mendapatkan dampak pembangunan yang

seharusnya/diinginkan. Tentu melalui pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu pengelolaan terhadap sumber daya alam harus dilakukan dengan mengambil keputusan serta kebijakan dengan sangat hati-hati bahkan harus teliti agar generasi yang akan datang nantinya masih tetap bisa merasakan dan juga menikmati kekayaan alam yang kita punya saat ini.

Menurut Surna T. Djajadiningrat (2020) bahwasanya pembangunan berkelanjutan itu memiliki tiga pilar diantaranya kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan serta faktor kependudukan, oleh karena itu pembangunan berkelanjutan tidak akan mempunyai makna ataupun bermakna jika tidak melihat aspek-aspek yang berwawasan lingkungan, karena nantinya akan banyak menimbulkan dampak merugikan baik terhadap kualitas lingkungan, kondisi sumber daya alam serta faktor kependudukan. Karena pembangunan berkelanjutan seharusnya dianggap untuk sebagai proses penyelesaian masalah yakni kemiskinan, keterbelakangan dan juga masalah sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu banyak investor asing yang datang ke Indonesia untuk membuka usaha, maka dari itu pemerintah harus mengeluarkan strategis dan kebijakan yang baik dan sesuai supaya mencegah terjadinya dampak negatif terhadap kerusakan alam dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 2 Tahun 2012, yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021-2032. Regulasi tersebut mengatakan bahwa lokasi tempat berdirinya PLTU Teluk Sepang tidak diperuntukkan untuk pendirian/pembangunan pembangkit listrik dikarenakan merupakan Kawasan strategis di provinsi Bengkulu. Serta tempat berdirinya PLTU ini berada di kawasan taman wisata alam (TWA) pantai Panjang, pulau baai dan teluk sepang, kecamatan kampung melayu, kota Bengkulu termasuk daerah rawan bencana tsunami, pasal 4 ayat 3 peraturan pemerintah (PP) nomor 27

tahun 2012 tentang izin lingkungan menyebutkan dalam hal lokasi rencana usaha tidak sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW), maka dokumen amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan. Dan juga Pasal 36 ayat 2 UU No 32 tahun 2009 tentang izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan payung hukum dan jaminan atas hak lingkungan yang baik dan sehat, serta izin lingkungan diterbitkan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Adapun alasan peneliti mengambil studi kasus pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini dikarenakan adanya hal menarik yang harus diteliti, dan ingin mengetahui bagaimana dampak dari pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang terhadap sosial dan ekologi serta beberapa konflik yang telah terjadi antara pihak perusahaan dan dengan masyarakat sekitar tentang permasalahan fungsi lingkungan yang terganggu, konflik lahan yang belum tuntas, dan lain sebagainya. Karena adanya berita simpang siur tentang kenapa perusahaan tidak mengganti lahan/kebun masyarakat yang terdampak dikarenakan katanya kebun lahan sawit dan umbi-umbian lain yang ditanami masyarakat itu sebenarnya milik perusahaan PT. Pelindo II. Kemudian ingin meneliti apakah pihak PLTU Teluk Sepang ini sudah menjaga lingkungan yang sudah ditulis di AMDAL tentang baku mutu yang berisikan air, tanah serta udara yang kemudian untuk tetap dijaga kualitasnya supaya tidak merusak serta memperparah kerusakan lingkungan dan tentunya keadaan serta kesejahteraan sosial di sekitar PLTU Teluk Sepang, Kota Bengkulu.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana dampak dari pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang terhadap sosial dan ekologi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan PLTU Teluk Sepang terhadap sosial budaya, masyarakat dan lingkungan sekitar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan manfaat/sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi jurusan ilmu pemerintahan
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah terjadi dan juga dari bahayanya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar akibat bahan bakar batu bara dan juga limbah yang dihasilkan dari pengoperasian PLTU Teluk Sepang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Dari penelitian ini, diharapkan nantinya bisa memberikan masukan umum terutama masukan positif bagi peneliti agar mengetahui lebih dalam terhadap dampak bahaya terhadap aspek pencemaran lingkungan dari pengaruh akibat limbah batu bara.
- b. Dari penelitian ini, diharapkan agar nantinya memberikan masukan baik terhadap pemerintah dan instansi, supaya dapat menindaklanjuti terkait didalam melakukan keputusan, kebijakan, serta pengaturan terhadap

pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian/pengelolaan PLTU yang memakai bahan bakar utama batu bara.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Didalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan atau dipaparkan beberapa penelitian terdahulu tentang pltu batu bara teluk sepang dari beberapa sumber referensi khususnya mengkaji mengenai dampak negatif keberadaan pltu teluk sepang bagi lingkungan sekitar, berikut beberapa referensi yang ditampilkan peneliti dengan menggunakan penelitian/kajian terdahulu, adapun tinjauan pustaka sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2021) yang berjudul “Upaya Resolusi Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang, Bengkulu” dari hasil penelitian, berdasarkan dugaan dari koalisi langit biru dan masyarakat setempat yang tinggal di teluk sepang mengatakan bahwasanya banyak penyusutan yang diakibatkan oleh limbah uji coba batu bara yang pada awalnya juga menjadi penolakan keberadaan PLTU teluk sepang oleh masyarakat dikarenakan banyaknya faktor yang merugikan warga, tetapi setelah dibuktikan katanya kematian penyusutan bukan diakibatkan oleh limbah pltu batubara melainkan bakteri, tetapi tetap saja keberadaan pltu ini masih menjadi konflik dan masih terus berlanjut/berlangsung karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan dan juga aturan yang ada.

Kedua, berdasarkan penelitian dari (Lulufani & Setyadharma, 2020) Yang berjudul “Dampak Ekonomi dan Lingkungan Keberadaan PLTU Tanjung Jati B Terhadap Masyarakat”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwasanya terdapat dampak positif dan negatif, dampak positif diantaranya dengan adanya pltu ini warga sekitar mendapatkan perubahan ekonomi yang signifikan dikarenakan berubahnya mata pencaharian diantaranya ada yang bekerja di pltu kemudian ada warga yang mendirikan

kos-kosan serta warung sembako, sehingga mengurangi pengangguran, serta pihak perusahaan sangat membantu karena berkontribusi terhadap masyarakat melalui corporate social responsibility yang berupa pemberian kambing, memberikan program kejar paket B juga C, serta tak lupa juga memberikan bantuan berupa beasiswa kepada masyarakat, dan memberikan berbagai macam pelatihan-pelatihan kepada masyarakat supaya bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, untuk dampak negatifnya masyarakat terkena pencemaran lingkungan diantaranya tentu saja susah ditemukannya air bersih, lahan pertanian berkurang serta kemudian banyak jalan yang rusak dikarenakan aktivitas dari pltu, tetapi tidak ada kontra dari masyarakat dikarenakan pihak perusahaan mengatasi langsung dan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan.

Berdasarkan penelitian dari (Prabandari & Rengga, 2019) Yang berjudul “Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”. Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya banyak terdapat dampak negatif terhadap masyarakat sekitar PLTU batang dimana PLTU ini dibangun di atas lahan produktif padahal lahan tersebut merupakan sumber mata pencaharian mereka, selanjutnya dampak lain dari pltu batang banyaknya masyarakat yang menganggur terutama yaitu perempuan yang sudah berumur, juga terjadi konflik lahan, dimana PLTU masih dalam rekonstruksi, namun warga (pemilik lahan) tidak mau menerima kompensasi

Penelitian dari (Aji & Legowo, 2020) Yang berjudul Resistensi Masyarakat Ujungnegero Pasca Pembangunan Pltu di Batang Jawa Tengah. Dari penelitian tersebut disimpulkan masyarakat batang menilai pembangunan pltu banyak memberikan dampak positif diantaranya dikarenakan terciptanya lapangan baru dan masyarakat

merasa perekonomiannya terangkat, tetapi di lain sisi juga terdapat penolakan pembangunan yang bisa dilihat dari permintaan ganti rugi, penyingkiran pekerja dan juga tak lupa dampak terhadap lingkungan, permasalahan lingkungan sudah perlahan diperbaiki tetapi untuk ganti rugi belum menemukan titik terang dikarenakan warga merasa keberatan dengan jumlah ganti ruginya dan juga penyingkiran kinerja yang dirasa masih berat sebelah terhadap lokal dan asing.

Sama halnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso et al., 2016) yang berjudul “Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa banyak dampak yang diakibatkan oleh pltu ini diantaranya ada 4 yang terdampak, yang pertama yaitu dampak individu dimana warga merasakan dampak negatif terhadap kesehatan yaitu gatal-gatal, kulit kering serta batuk berdahak, dan juga masyarakat tidak merasa nyaman diakibatkan cuaca yang menyengat dan kebisingan oleh mesin pltu, kemudian dampak yang kedua ialah dampak organisasional yaitu dimana organisasi ataupun kelompok contohnya seperti kelompok ternak, tani dan juga tim sepak bola yang ada diberi bantuan oleh pltu, tetapi tidak semua, tentu ada juga organisasi lain yang tidak mendapat bantuan yang sama dari pltu. Selanjutnya dampak masyarakat terhadap pencemaran air, pencemaran udara dan juga darat, terakhir yaitu dampak sosial, terdapat banyak penyimpangan antara lain yaitu balapan liar, menjual minuman-minuman beralkohol, oknum melakukan kawin kontrak serta kegiatan prostitusi, tetapi dibalik itu ada juga dampak positif adanya keberadaan pltu ini yaitu pihak perusahaan dan lembaga lainnya mampu saling menjaga hubungan baik serta harmonis, baik dengan lembaga desa juga pihak pltu, kemudian sebagian warga diberikan bantuan pendidikan dan juga keagamaan.

Menurut jurnal penelitian yang dilakukan (Noveli, J. 2020). Dengan judul “Analisis Terhadap Putusan No 112GLH2019PTUN.BKL Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu”. Dari penelitian menyimpulkan bahwasanya masih terdapat sengketa di antara pihak minoritas dan mayoritas terhadap putusan majelis hakim yang sudah diatur di UU, tetapi untuk dampak terhadap lingkungannya sendiri tidak dibahas secara detail dan menyeluruh dikarenakan dianggap belum terlalu terlihat pencemaran terjadi dikarenakan pengoperasian/pengelolaan PLTU ini sendiri belum lama berjalan dan masih dikatakan tahap uji coba atau masih baru.

Berdasarkan jurnal penelitian yang (Ulia, N., Tukidi & Putro, 2017). Tentang/judul “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Sikap Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Pltu Tanjung Jati B Di Kabupaten Jepara”. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan tingkat persentase pendidikan disana masih sangat rendah oleh karena itu berpengaruh dengan sikap masyarakat disana yang memilih netral atau dikatakan tidak ada penolakan atau apapun dan bisa dikatakan tidak bersikap, oleh sebab itu masyarakat disana mengatakan tidak ada dampak yang berarti dengan adanya pltu ini.

Berdasarkan penelitian dari (Faruk, F & Altarans, 2020) yang berjudul “Dampak PLTU Tidore Terhadap Lingkungan Udara, Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara.” Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nya dampak PLTU ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat Rum Balibunga dikarenakan terdapat 3 indikator setelah berdirinya PLTU yaitu pekerjaan, pendapatan dan relokasi, tetapi dibalik itu masyarakat juga berharap terhadap peningkatan pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari adanya pltu ini yaitu kebisingan dan debu batubara tentunya khususnya di sekitar daerah Tidore dan juga

masyarakat sekitar berharap adanya sosialisasi terhadap penanggulangan debu (pembagian masker juga perlindungan diri).

Berdasarkan penelitian dari dengan judul (Putri, 2019) “Perizinan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terkait Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya dampak plus dan minus terhadap PLTU, dampak positifnya adalah dengan keberadaan PLTU dianggap lebih efisien dan dikatakan biaya operasinya juga lebih murah, tetapi lebih banyak minusnya disini karena terlepas dari polutan yang tentunya dapat mematikan, membahas sosial ekonomi boleh saja, tetapi harus dengan memperhatikan masyarakat/ pihak mayoritas yang sangat terdampak, harus adanya kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk struktur sosial yang sudah mapan tentunya, serta harus melibatkan para masyarakat dalam pengambilan keputusan tentunya dan membahas dampaknya secara menyeluruh, baik lingkungan, ekosistem, flora, fauna dan lainnya, karena mereka lah yang paling terkena dampak buruknya.

Berdasarkan penelitian dari (Bahri, 2018) Dengan judul “Dampak Kesehatan dan Lingkungan Emisi Debu Dari Aktivitas PLTU Karangandri Cilacap”. Dari penelitian disimpulkan bahwa jalur bongkar muat melalui jalur pelabuhan sangat mempengaruhi kesehatan dibandingkan bongkar muat melalui dermaga, dampak ini lebih berpengaruh terhadap manusia juga lingkungan dikarenakan menimbulkan gangguan pernapasan, pencemaran perairan dan tentunya terhadap daratan juga.

Berdasarkan penelitian dari (Dwi et al., 2021) yang berjudul Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto dari hasil penelitian menyebutkan bahwasanya pembangunan PLTU ini menyebabkan pada dampak sosial dan juga ekonominya. Pendirian perusahaan PLTU di Kabupaten

Jeneponto memiliki dampak positif dan negatif di lingkungan sekitar. Bersikap pro-PLTU bagi yang diuntungkan pembangunannya. Mereka yang kurang beruntung justru menentang keberadaan PLTU tersebut. Namun keberadaan PLTU tersebut semakin merugikan perekonomian masyarakat setempat karena berdampak negatif terhadap habitat laut yang menjadi sandaran sebagian masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Rumput laut yang dulu tumbuh di sepanjang pantai Pantai Bahari kini semakin rusak akibat limbah dari pembangkit listrik. Demikian pula, karena ikan bergerak menjauh dari daerah tangkapan aslinya, daerah penangkapannya semakin jauh. Pemerintah, di sisi lain, yang seharusnya mengurangi kerusakan melalui kebijakan, justru melakukan pekerjaan yang buruk.

Berdasarkan Penelitian dari (Amri & Aرسال, 2018) yang berjudul Dampak Pembangunan PLTU Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Penduduk Di Desa Ujung Negara Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya perubahan yang terjadi karena pembangunan ekonomi sangat berdampak positif bagi masyarakat desa Ujung Negara karena dari adanya pembangunan PLTU pendapatan penghasilan bertambah di bidang transportasi kendaraan umum. 11 Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan sebelum adanya pembangunan PLTU di desa Ujung Negara merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih sangat primitif dan sederhana, karena desa Ujung Negara letak geografisnya jauh dari perkotaan dan tempat keramaian seperti di kota, jarak desa Ujung Negara dengan kota ditempuh dengan kendaraan sekitar 30 menit, jadi warga Desa Ujung Negara sendiri jarang untuk belanja atau bepergian ke kota mengingat jarak yang jauh dan kendaraan umum menuju ke kota sangatlah minim dan kedatangannya kendaraan tidak pasti bahkan jenis kendaraan umum yaitu mobil bak terbuka sehingga untuk keselamatan penumpang juga sangat berbahaya dan beresiko. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan setelah

adanya pembangunan PLTU mengalami perubahannya sangat signifikan karena perekrutan karyawan diutamakan terlebih dahulu yang berdomisili warga Ujung Negara sehingga dengan cara ini dapat mengatasi angka pengangguran Desa Ujung Negara, karena tingkat pengangguran turun dapat mempengaruhi tingkat perekonomian keluarga yang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja masih pas-pasan sekarang setidaknya masih ada sisanya, para pemuda yang bekerja membantu untuk pembangunan pltu diberi gaji tiap bulannya sesuai UMR yang berlaku di Kabupaten Batang, dengan ini maka bentuk penghasilan warga Ujung Negara yang sebelumnya tidak tetap karena hasilnya bergantung terhadap alam sekarang penghasilannya tetap dan setiap hari bekerja. Meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Ujung Negara.

Berdasarkan penelitian dari (Pontoh, S. N., Moku, B., & Paat, 2021) yang berjudul Dampak Pembangunan PLTU Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Binjeita II Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut mengatakan Pengaruh pembangunan PLTU terhadap pengalihan mata pencaharian warga Binjeita II dapat dilihat dari sisi baik dan negatif. Sisi positifnya, terutama kepastian mendapatkan uang atau pertimbangan ekonomi sebagai alasan, seperti: membuka peluang kerja alternatif baru, lapangan kerja, menumbuhkan usaha mikro seperti warung kopi, kos-kosan dan interaksi sosial budaya, alih etos kerja, desa jujur dan terang terus menerus untuk memudahkan kontrol dalam kegiatan sosial. Sisi negatifnya, mereka yang berprofesi sebagai nelayan atau petani pindah karir untuk bekerja di PLTU sebagai pegawai atau buruh. Akibatnya, lahan pertanian terbengkalai, dan penangkapan ikan menjadi semakin sulit dan mahal. Masalah kesehatan lingkungan meliputi kebisingan, debu, banjir, dan nelayan tradisional semakin sulit menangkap ikan saat hujan deras.

Berdasarkan penelitian (Nooraliza & Salam, 2020) yang berjudul "Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Terhadap Perubahan Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan (Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)." Hasil penelitian mengatakan bahwasanya banyak dampak positif dan negatif diantaranya, Indonesia mendapatkan alat penerang, banyak peluang kerja dan peluang usaha serta mendapatkan bantuan dari pihak PLTU yang Kebanyakan bantuan diberikan dalam bentuk barang seperti makanan pokok yang merupakan program CSR dari PLTU sendiri, dan tentunya tak lupa dengan dampak negatifnya yaitu buruh tani dan pedagang kecil yang tidak punya lahan sendiri, ada pula pemilik lahan yang terkena imbasnya langsung akibat pembangunan PLTU, kemudian terjadi konflik demo, konflik terjadi akibat penduduk sekitar merasa tidak terima terhadap pihak PLTU karena banyak lamaran pekerjaan yang diajukan oleh masyarakat sekitar ternyata ditolak oleh pihak PLTU. Demo dilakukan untuk menyuarakan kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar atas ketidakadilan ini, kemudian hujan abu atau debu yang merupakan bottom ash dan fly ash yang banyak menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, serta suara kebisingan dan udara yang semakin panas.

Berdasarkan penelitian dari (Mustofa, M., & Sagara, 2015) dengan judul Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap) Paiton di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Dari hasil penelitian terdapat beberapa dampak positif dan negatif terhadap sosial ekonomi warga setempat, yang pertama dampak positif terhadap keberadaan PLTU Paiton yaitu yang pertama berkurangnya jumlah pengangguran dikarenakan pihak perusahaan mengrekrut tenaga kerja lokal dengan sistem kerja tetap dan kontra, Kemudian ada dukungan keuangan dari perusahaan pertambangan untuk fasilitas dan infrastruktur kepentingan umum seperti kantor dan balai desa, masjid, gerbang perbatasan, penerangan jalan, dan papan

pengumuman, antara lain. Kemudian dampak buruknya sendiri, yaitu kurangnya disiplin keselamatan kerja. Jika luka yang mereka alami cukup parah, seperti patah tulang dan cacat permanen, mereka tidak dapat bekerja lagi dan menjadi pengangguran, membuat mereka tidak menguntungkan secara ekonomi dan menurunkan nilai moral dan keluarga mereka. Karyawan di PLTU telah menyesuaikan gaya hidup mereka menjadi lebih konsumtif sebagai akibat dari kenaikan gaji.

Berdasarkan Penelitian dari (Sabubu, 2020) dengan judul “Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Perspektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat.” Menurut temuan penelitian, semua peraturan yang mengatur pembangkit listrik tenaga batubara telah gagal melindungi dan memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pengertian regulasi ke depan dikaji dari tiga perspektif: substansi hukum, budaya hukum, dan penegakan hukum. Dari sisi hukum, terlihat jelas bahwa tidak ada regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dan diperlukan instrumen tambahan seperti instrumen lokasi dan Clean Air Act. Budaya hukumnya lebih mementingkan pertumbuhan jangka panjang yang ramah lingkungan. Selain penegakan hukum, beberapa standar masih belum diikuti oleh perusahaan yang bersangkutan, seperti di pertambangan batu bara.

Berdasarkan penelitian dari (Ansyari, 2018) dengan judul Upaya Penolakan Oleh Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan PLTU Batang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak yang paling terasa oleh masyarakat yang sebagian besar nelayan di wilayah tersebut adalah kehilangan mata pencaharian mereka dikarenakan hasil tangkapan ikan semakin menurun, dengan pembangunan PLTU tersebut dapat dipastikan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut yang sebagian besar merupakan petani dan nelayan, sedikit demi sedikit akan mulai kehilangan mata pencahariannya laut tidak lagi produktif untuk membantu nelayan mencukupi

kebutuhannya, tanah yang tergerus tidak lagi menghasilkan hasil panen untuk petani yang menjadikan hilangnya penghasilan untuk kebutuhan dapur dan lain sebagainya, masalah Sumber daya Manusia (SDM) juga sangat berpengaruh pada dampak ekonomi mereka, pada dasarnya masyarakat yang sebelum adanya proyek tersebut adalah nelayan dan petani, tidak memiliki kemampuan yang dapat menjadikan mereka menjadi karyawan di perusahaan tersebut mereka kalah bersaing dengan karyawan yang datang dari luar daerah mereka.

Berdasarkan penelitian dari (Fitrianita et al., 2019) dengan judul Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian tersebut mengatakan adanya pembangunan PLTU Cilacap di wilayah pesisir dan laut telah menambah permasalahan baru bagi nelayan Menganti Kisik. Pembangunan PLTU Cilacap telah mengakibatkan dampak kerugian sosial, ekonomi, dan fisik bagi nelayan dan memicu timbulnya potensi konflik. Hal ini karena kebijakan pembangunan dirasakan berat sebelah dan hanya berfokus pada pembangunan sektoral, dalam hal ini PLTU Cilacap Lah yang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Nelayan sebagai pihak yang selalu diidentikkan dengan kondisi status sosial rendah akan selalu menjadi pihak yang terpinggirkan.

Berdasarkan dari daftar tinjauan pustaka di atas memberikan perbedaan diantara penelitian sebelumnya atau yang sudah dilakukan terdahulu dengan yang saat ini sedang ditulis oleh sang peneliti, peneliti sebelumnya banyak meneliti aspek sosial ekonominya, sedangkan pada penelitian kali ini mengenai aspek sosial dan juga lingkungannya. Kesamaan dari penelitian ini adalah fokus terhadap dampak bahaya yang ditimbulkan dari adanya Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kelebihan dari penelitian kali ini ialah sang peneliti akan meneliti dari segi kebijakan Pembangunan, Politik Lingkungan dan Kutukan Sumber Daya Alam yang tentu ketiganya berkaitan dengan sosial juga lingkungan hidup dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang hanya meneliti kebijakan dan sosial ekonominya, menariknya dari penelitian ini sang peneliti akan berfokus kepada dampak akibat kebijakan pembangunan, politik lingkungan serta kutukan sumber daya alam yang sebagaimana merupakan istilah yang digambarkan untuk negara-negara kaya sumber daya alam tetapi tidak berhasil atau gagal memanfaatkannya dengan baik.

1.6 KERANGKA DASAR TEORI

1.6.1 Kebijakan Pembangunan

Menurut Emil Salim (2020) Implementasi dan perumusan kebijakan yang baik dikatakan sangat penting untuk menjamin ketertiban dan arah pembangunan, kebijakkan merupakan dasar yang diharapkan agar dapat mengatasi masalah/mencapai tujuan, dampak dari kebijakan sendiri yaitu kerusakan sumber daya yang dapat dirasakan langsung oleh suatu kelompok/sasaran kebijakan.

Pembangunan tentu saja merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, kemudian proses pembangunan harus memperhatikan segala dampak baik dan buruknya, pembangunan juga sangat berhubungan erat terhadap lingkungan, oleh karena itu pembangunan yang baik juga harus memperhatikan apakah pembangunan memberikan resiko yang dapat merugikan atau tidak, karena aspek yang paling penting turut dipengaruhi oleh pembangunan tentu saja aspek lingkungan. Karena

pembangunan yang bermanfaat tentu saja pembangunan yang memperhatikan konsep kelestarian lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hakikatnya tidak bisa dipisahkan, karena berkaitan satu sama lain, pembangunan selalu mempengaruhi lingkungan, jika kita lihat secara umum tentu saja pembangunan bertujuan menjamin mutu hidup rakyatnya serta memenuhi semua kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik, namun jika pembangunan tidak maka dari itu pembangunan harus memperhatikan setiap kebijakan agar terpelihara lingkungan dari kerusakan, tetapi jika terjadi kerusakan yang parah terhadap ekosistem tempat hidup manusia, dan menyusahkan kehidupan manusia kedepannya berarti dapat dikatakan bahwasanya pembangunan berkelanjutan tidak terjadi.

Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) merupakan pembangunan yang memaksimalkan serta memanfaatkan sumber daya alam yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan kehidupan yang sehat, mewujudkan pendidikan, dan lainnya, ada sekitar 17 tujuan-tujuan pada pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut sustainable development goals (SDGs) yaitu :

1. Mengakhiri kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Memastikan kehidupan masyarakat sehat serta sejahtera
4. Memastikan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat
5. Mencapai kesetaraan gender juga memberdayakan semua perempuan
6. Memastikan ketersediaan air bersih
7. Memastikan akses energi terjangkau

8. Mendukung pertumbuhan ekonomi
9. Melakukan pembangunan/infrastruktur
10. Pengurangan tentang kesenjangan
11. Kota dan juga masyarakat yang berkelanjutan
12. Mengatur tentang konsumsi juga produksi yang bertanggungjawab
13. Menangani perubahan iklim
14. Lingkungan kehidupan bawah air
15. Lingkungan kehidupan di darat
16. Mendukung masyarakat yang damai/akses terhadap keadilan bagi semua
17. Memperkuat ukuran implementasi/merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tetapi jika dilihat dari ke 17 tujuan dari SDGs sampai saat inipun tidak memberikan rasa optimis dalam pembangunan masyarakat global untuk kesejahteraan, seharusnya melalui SDGs ini indonesia bisa menjadi lebih ambisius untuk mencapai target ataupun tujuan pembangunannya, sayangnya sampai saat ini belum terlihat dan dinyatakan berhasil juga tidak ada kebijakan dari pemerintah yang menunjukkan bahwasanya indonesia serius melaksanakan konsep SDGs (Sustainable Development Goals) ini. Pembangunan di indonesia belum mencerminkan realitas sebenarnya dan belum mencerminkan realitas sebenarnya dan belum ditemukannya bukti-bukti bahwasanya pertumbuhan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan oleh masyarakat sendiri dengan menjamin pemerataan telah terjadi, serta faktanya hanya berdampak terhadap peningkatan kekayaan pada segelintir orang-orang tertentu saja atau bisa dikatakan pihak-pihak minoritas dan tentunya mengakibatkan terjadinya kesenjangan, maka dari itu jika dilihat dari hasil yang didapat terhadap pembangunan berkelanjutan, harus adanya perubahan terhadap orientasi pembangunan tentunya

terhadap semua aspek dan juga sektor lingkungan masyarakat yang menonjol terhadap kesenjangan/ketimpangan.

Menurut Emil Salim (2020) Di Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat kesenjangan dimana distribusi terhadap pendapatan lebih condong kepada/kearah orang kaya, dimana distribusi terhadap antar negara juga dalam negara rasionya sekitar 20/80 dimana negara maju dengan populasi ataupun penduduk 20 persen menguasai 80 persen, kemudian sebaliknya pada negara berkembang yang populasinya 80 persen cuma mendapatkan sekitar 20 persen pendapatan dunia. Jikalau dilihat dari kondisi ini, tentu perlunya pembangunan berkelanjutan yang lebih ditata lagi supaya menjadi lebih baik dari sisi ekonomi, sosial juga lingkungan harus bergerak maju secara bersamaan.

1.6.2 Politik Lingkungan

Menurut De Jouvenel (2020) politik lingkungan adalah penataan terhadap daya-daya politik sebagai suatu hal didalam pengelolaan alam yang terdampak, Serta diakibatkan oleh aktivitas/ulah manusia dalam konteks pembangunan ekonomi dan tentu tujuan akhir dari ekologi politik ini yaitu yang disebut sebagai keberlanjutan pembangunan secara ekologis.

Politik Lingkungan merupakan politik yang membahas mengenai sumber daya alam yang dimana seharusnya pemerintah harus tepat didalam mengambil kebijakan/keputusan tentang penanganan masalah terhadap lingkungan dan juga dampak yang bisa ditimbulkan, politik lingkungan juga menawarkan opsi dan berbagai alternatif didalam menangani pengelolaan sumber daya alam, politik lingkungan bisa menjadi sesuatu yang selalu saja berkaitan dengan bagaimana kepentingan yang berbeda, dan juga pertentangan oleh berbagai pihak baik mayoritas dan minoritas, serta

aktor yang berbeda tujuan dan kepentingan juga tak jarang dipertentangkan akibat adanya konflik sumber daya alam, terutama lingkungan.

Salah satunya bisa kita lihat pencemaran lingkungan akibat dampak dari pengoperasian/pengelolaan PLTU yang memakai bahan utama batu bara, tentu saja dampak dari limbah pengelolaan, baik limbah air bahang panas, fly ash juga bottom ash yang ditimbulkan nantinya dapat menimbulkan masalah lingkungan dan merupakan sebuah faktor atau perubahan suatu kondisi tata lingkungan yaitu dimana perubahan dari segi tanah, air dan juga udara yang menyebabkan kerusakan dan sangat merugikan bagi kehidupan manusia, hewan dan juga tumbuhan sekitar yang disebabkan dari limbah industri dan lain-lain, diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri, sehingga membuat kerusakan lingkungan yang tidak berfungsi seperti semula/semestinya.

Dampak lain dari politik lingkungan yang berbeda kepentingan terhadap pihak minoritas bisa menyebabkan terancamnya kehidupan kelompok mayoritas yang terdampak, tidak memperhatikan mutu hidup masyarakat dan juga polusi udara yang dihasilkan dari pltu menyebabkan penyakit bagi masyarakat sekitar, serta yang menghirup udara tidak sehat setiap harinya, Kerusakan lingkungan dikelompokkan menjadi beberapa diantaranya adalah tailing/ampas buangan, polusi udara, kebisingan, kualitas air/tercemarnya dan lainnya.

Pendekatan ekologi politik yang pertama, menurut Robbins (2020), adalah degradasi dan marginalisasi; Persoalannya, perubahan yang terjadi disebabkan oleh eksploitasi berlebihan yang berujung pada kemiskinan. Kedua, konflik lingkungan muncul dari kurangnya akses lingkungan/kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh negara, swasta, dan elit nasional, sehingga menimbulkan konflik antar kelompok. Isu ketiga adalah konservasi dan kontrol, di mana partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sumber daya alam terlepas/dihilangkan, dan empat identitas lingkungan dan gerakan sosial, di mana pertarungan politik biasanya merupakan upaya untuk mempertahankan mata pencaharian dan menjaga lingkungan.

1.6.3 Teori Kutukan Sumber Daya Alam

Menurut Richard Auty (2018) yang dikatakan sebagai kutukan Sumber daya alam yaitu merupakan istilah untuk negara-negara yang bisa dikatakan sangat kaya terhadap sumber daya alam tetapi gagal untuk mengambil manfaat dari kekayaan yang dimiliki negaranya, bahkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan seringkali dan secara signifikan cadangan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, jauh lebih buruk di negara-negara dengan cadangan besar dari pada di negara-negara dengan cadangan lebih rendah. Impor dari negara lain mengungkapkan bahwa sebagian besar negara berkembang yang menjual sumber daya alam memiliki standar hidup yang sangat rendah.

Ada tiga sub-literatur yang berbeda tentang kutukan sumber daya alam, menurut berbagai sumber literatur: yang pertama adalah hubungan antara sumber daya alam dan kinerja ekonomi, yang kedua adalah hubungan antara sumber daya alam dan rezim politik, dan yang ketiga adalah hubungan antara sumber daya alam dan rezim politik. sumber daya alam dan satu sama lain. Alam dan rezim politik adalah dua hal yang terlintas dalam pikiran, dalam hal sumber daya alam dan perang saudara. Kutukan sumber daya alam ini telah digambarkan sebagai fenomena multi-faceted yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi tetapi juga perselisihan sipil dan otoritarianisme. Kutukan sumber daya alam sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berdampak negatif terhadap pembangunan.

David Efendi (2020) pernah menuliskan bahwasanya paradigma pembangunan neoliberal telah bisa disaksikan bahwasanya bangsa Indonesia telah menerima kutukannya, Sumber daya alam menjadi berkah besar yang mengalir kepada konglomerat, sementara sebagian besar rakyat hanya mendapat petaka serta bencana dari keberlimpahan sumber daya alam yang ada. Di Indonesia sendiri, tidak adanya biaya untuk kerusakan, bahkan RUU cipta kerja pun mengisyaratkan bahwasanya negara yang berkembang yang punya kegilaan terhadap modernitas, teknokrasi serta rasionalitas cenderung lebih menerapkan sistem produksi yang memperkosa alam/ecoside dan juga membangun masyarakat yang merusak manusia.

Pemerintahannya sangat kaya terhadap sumber daya alam yang ada, tetapi jika dilihat lagi kemampuan kinerja yang ada tidak cukup atau bisa dikatakan memiliki kinerja yang buruk/rendah di dalam pembangunan politik daripada negara lain yang cenderung tidak memiliki cukup banyak terhadap cadangan sumber daya alam. Bisa kita lihat bahwasanya negara- negara maju seperti negara yang dijuluki sebagai macan asia yaitu (Korea, Hongkong, Taiwan serta Singapura) tidak memiliki banyak cadangan sumber daya alam yang besar tetapi pemerintahnya memiliki kemampuan/kinerja yang baik dan juga sukses memiliki industri pengekspor yang sangat maju berbasis barang-barang manufaktur dan juga pertumbuhan ekonomi yang bisa dikatakan sangat pesat.

Tetapi indonesia yang dikenal dengan penghasil atau yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah bahkan tidak menjamin atau berdampak terhadap kesejahteraan hidup masyarakat miskin tentunya, terkhususnya di dalam hal kemiskinan dan juga pembangunan yang ada, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya negara yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah lebih bisa mengontrol pertumbuhannya dan yang memiliki sangat banyak cadangan sumber daya alam melimpah ruah menjadi kebalikannya.

Sumbangan dari cadangan sumber daya alam yang ada sendiri banyak memberikan kesempatan kepada negara diantaranya yaitu seperti belanja publik, meningkatkan/menambah sumber modal, aset keuangan pemerintah dan sebagai pembayaran hutang pemerintah tetapi dibalik itu tentu saja ketergantungan terhadap sumber daya alam akan memberikan dampak membahayakan bagi kualitas pemerintahan dan demokrasi, seperti yang kita lihat di negara berkembang seperti Indonesia ini, seperti sudah bisa dikatakan masuk perangkap karena sangat bergantung pada para investor dan para investor tidak meminjamkan dengan cuma-cuma, dibalik itu pasti ada timbal balik yang harus diberikan, dari sini nantinya mereka menuntut negara untuk menurunkan standar perlindungan sosial dan alam. Pada dasarnya menuntut negara merelakan martabat dan kedaulatan. Semakin banyak investasi yang diharapkan, makin besar pula martabat dan kedaulatan bangsa dan negara yang harus kita jual. Dan sekarang mungkin Indonesia telah mencapai tahap yang kita takutkan ini.

Kemiskinan semakin bertambah diakibatkan kebijakan dari pemerintah dan perencanaan program yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, pemerintah harusnya sadar bahwasanya peningkatan laju investasi tidak akan selalu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan malah semakin memperburuk keadaan dan perampasan lahan yang semula menjadi ladang pencaharian masyarakat setempat bahkan sumber daya yang menjadi penghasilan turun-temurun oleh atau dari suatu wilayah itu sendiri.

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual yaitu lanjutan dari kerangka teori terkait masalah-masalah variabel atau penulisan konsep-konsep secara singkat serta jelas di dalam penelitian, Supaya memudahkan peneliti mengoperasionalkan di lapangan, Untuk memudahkan dalam menafsirkan teori maka ditentukan definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti yaitu :

1.7.1 Kebijakan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hakikatnya tidak bisa dipisahkan, karena berkaitan satu sama lain, pembangunan selalu mempengaruhi lingkungan.

1.7.2 Politik Lingkungan

Politik Lingkungan yaitu merupakan politik yang membahas mengenai sumber daya alam yang ada dimana seharusnya pemerintah harus tepat didalam mengambil sebuah kebijakan/keputusan.

1.7.3 Kutukan Sumber Daya Alam

Indonesia yang dikenal dengan penghasil atau mempunyai sumber daya alam yang melimpah bahkan tidak menjamin atau berdampak terhadap kehidupan rakyatnya, terkhusus dalam hal kemiskinan juga pembangunan.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Dengan melihat definisi konseptual diatas bisa disimpulkan didalam menentukan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat oleh adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sepang, maka definisi operasional ini saya gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian saya.

TABEL 1.1

Kerangka Teori, Variable, Indikator

Kerangka Teori	Variabel	Indikator
Teori pembangunan Berkelanjutan	Dampak Kebijakan	a.Regulasi perda b.Dampak dari kebijakan pembangunan bagi masyarakat
Teori Politik Lingkungan	Dampak Ekologi	a.Gangguan akses b.pencemaran ekosistem dan udara
Teori Kutukan Sumber Daya Alam	Dampak Sosial	a.Konflik Sosial Budaya b.Gugatan warga

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Menurut (Miles & Huberman, 1984) Data Kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan kokoh dan juga tentu memuat proses yang terjadi dalam lingkup setempat, analisis data kualitatif dilakukan secara langsung serta terus-menerus sampai tuntas.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu kegiatan dimana mengumpulkan beberapa informasi atau data dan sang peneliti berusaha menganalisis menggunakan data-data yang sudah ada.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Bengkulu tepatnya di Desa Teluk Sepang. Kecamatan Kampung Melayu, Pulau Baai, Kota Bengkulu. Guna mendapatkan data yang nyata/benar dari responden mengenai hal negatif dari dampak PLTU tersebut. Yaitu dampak PLTU Teluk Sepang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sejak mulai beroperasi.

1.9.3 Unit Analisis Data

Di Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik wawancara, wawancara sendiri yaitu salah satu teknik yang dipakai ataupun digunakan untuk mengumpulkan data didalam sebuah penelitian. Secara sederhananya interaksi antara pewawancara atau interviewer serta sumber informasi langsung tatap muka ataupun dengan luring serta bisa juga dilakukan daring melalui aplikasi yang sudah canggih contohnya melalui Zoom, Skype, google meet, WA chat or video call dan lain sebagainya (Yusuf, 2014). Tetapi harus dengan tetap memastikan kita benar-benar berkomunikasi dengan orang yang kita tuju, biasanya wawancara daring dilakukan karena mempertimbangkan banyak hal diantaranya karena terbatasnya waktu dan jarak yang jauh, serta mengingat Indonesia yang masih darurat pandemic covid-19 oleh sebabnya tidak memungkinkan untuk wawancara tatap muka secara langsung. Maka Unit Analisis Data di dalam penelitian ini adalah organisasi masyarakat yang bergerak mempertahankan lingkungan hijau yaitu Kanopi Hijau atau organisasi gerakan lingkungan yang dengan tujuan utamanya meningkatkan jaminan keselamatan lingkungan dan Koalisi langit Biru

Teluk Sepang yang merupakan organisasi perjuangan melawan energi kotor batu bara dan juga masyarakat yang berada di sekitar PLTU Teluk Sepang.

1.9.4 Jenis Data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder agar supaya memudahkan peneliti mendapatkan hasil dan informasi penelitian yang berhubungan dengan yang sedang diteliti.

a. Data Primer

Data Primer yaitu merupakan data yang didapatkan langsung oleh sang peneliti melalui wawancara terhadap subjek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui/mendapatkan informasi sebenarnya yang terjadi di lapangan serta data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan peneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sudah ada, dan data ini biasanya didapat melalui penelitian-penelitian sebelumnya ataupun bisa didapat melalui jurnal-jurnal online, adapun kegunaan data sekunder ini tentu saja sebagai pendukung dari data primer, tentunya harus sesuai dengan bahasan yang sedang diteliti.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian kualitatif sangat diperlukan observasi selain agar peneliti bisa melihat secara langsung hal-hal yang menjadi konflik permasalahan yang selama ini terjadi, kemudian keadaan terhadap pengoperasian PLTU Teluk Sepang sehari-hari dan juga dampak-dampak lainnya yang menjadi keresahan bagi warga sekitar PLTU secara langsung. Pada saat observasi peneliti akan menemui

dan mewawancarai organisasi yang memperjuangkan lingkungan hijau yaitu kanopi dan koalisi langit biru Bengkulu, serta masyarakat sekitar PLTU Teluk Sepang.

b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik yang dipakai peneliti untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan suatu data dengan mengajukan pertanyaan atau dialog yang ditujukan kepada subjek penelitian dengan tujuan menggali informasi lebih dalam terhadap responden. Di Dalam wawancara ini yang terlibat atupun subjek penelitiannya yaitu kanopi hijau, koalisi langit biru Bengkulu dan juga masyarakat sekitar PLTU Teluk Sepang.

TABEL 1.2

Data Narasumber Wawancara

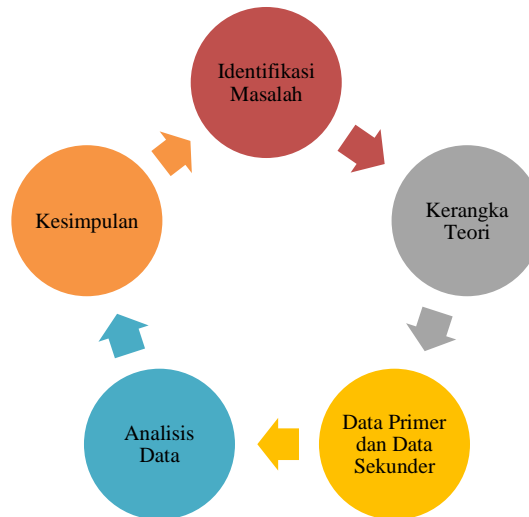
No	Narasumber	Jumlah	Tanggal Penelitian
1	Kanopi Hijau Indonesia	1	13 September 2021
2	Koalisi langit Biru Teluk Sepang	1	14 September 2021
3	Masyarakat	8	15 September 2021
4	Total	10	

1.9.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses dimana di dalam proses penelitian mencari dan menyusun data secara sistematis yang tentu saja diperoleh dari teknik pengumpulan data, Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat 3 analisis data kegiatan di dalam penelitian kualitatif, diantaranya reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan, yang kedua model data (Data Display) yaitu uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya, dan langkah yang terakhir yaitu penarikan/verifikasi

kesimpulan, kesimpulan awal bersifat sementara dan masih bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data.

GAMBAR 1.2



Struktur Analisis Data

1. Identifikasi masalah agar memudahkan penulis untuk melakukan penelitian
2. Kerangka Teori agar mengarahkan penulis untuk pembahasan yang tentunya selaras dengan judul penelitian
3. Data Primer dan Data Sekunder dengan menggunakan data wawancara terhadap responden serta mengumpulkan data langsung dari temuan dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu.
4. Analisis Data agar memudahkan penulis untuk menjelaskan ataupun menginformasikan temuan terhadap orang lain.
5. Kesimpulan didapatkan bila semua teknik penelitian sudah dilakukan dan diperkecil atau dikerucut supaya mendapatkan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan.